

# **RELASI ISLAM DAN SEKULARISME: *REVISITED***

## **(MENIMBANG PEMIKIRAN GABRIELE MARRANCI)**

**Oleh Irfan Abubakar**

(Advisory Board CSRC UIN Jakarta)

### **Pendahuluan**

Semenjak menguatnya kebijakan perang global yang dipimpin Amerika Serikat melawan terorisme pasca pemboman WTC 11 September 2001, perdebatan mengenai kompatibilitas antara Islam dan demokrasi memasuki babak baru. Dari sisi arena, perdebatan tidak lagi terbatas pada ruang-ruang akademik yang eksklusif, tapi telah merambah ke dalam diskursus publik digital yang melibatkan beragam aktor: politisi, tokoh agama, pengamat politik, dan pengamat media. Dari sisi epistemologis, isu kesesuaian Islam dan demokrasi tidak lagi dilihat dalam konteks proses sosial-politik, tapi telah menyoal akar ideologis-teologis Islam itu sendiri. Asumsi yang mendasari corak perdebatan yang teologis itu adalah akar penyebab dari tidak berkembangnya demokrasi di negara-negara Muslim adalah Islam itu sendiri.

Literatur yang mengkaji relasi Islam dan sekularisme khususnya di Barat bertendensi untuk menampilkan Islam sebagai agama yang pasif dan sebuah produk peradaban klasik yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan modern. Karena pengaruh teologisnya, Muslim otomatis akan selalu merespon tantangan modernitas dengan menengok ke belakang, ke peradaban masa silam (Roy, 2007). Dalam lingkaran akademik Barat, pendekatan mengkaji Islam dan politik cenderung terjebak dalam cacat metodologis yang menekankan pada apa yang dikenal dengan “reduksionisme perbandingan budaya”. Dengan pendekatan ini, berbagai keragaman budaya, variasi perkembangan sejarah, perbedaan aliran dan mazhab dalam Islam, disederhanakan menjadi satu penjelasan, yaitu budaya Islam yang jumud. Ini diperparah oleh tendensi Eropa sentris (*Eurocentrims*) yang meyakini kemodernan dan sekularisme dilahirkan dari rahim Pencerahan Eropa dan harus selalu berkiblat kepada fase sejarah yang secara keliru dianggap peristiwa yang tiba-tiba itu (Marranci, 2009).

Akibat dari cara pandang yang oversimplifikasi dalam melihat Islam dan sekularisme itu sendiri muncul tendensi yang totalitaristik dalam mengatasi isu krisis politik di dunia Islam yang mengusulkan

perubahan radikal ajaran Islam atau penerimaan norma-norma sosial baru tanpa melibatkan proses-proses kreatif dari agensi Muslim itu sendiri. Agar pengamatan terhadap realitas modern Islam dan sekularisme lebih akurat perlu dilihat ulang paradigma telogis-kebudayaan yang nyatanya menghasilkan persepsi yang jumud tentang relasi Islam dan politik. Muslim harus dilihat sebagai individu yang pada dasarnya memiliki karakteristik kemanusiaan yang sama dengan manusia manapun di belahan dunia ini, dalam hal berpotensi menjadi agensi dengan segala kesadaran, interpretasi dan kreatifitas dalam kehidupan sosial dan budayanya (Rapport, 1997, hal. 6). Lagi pula, sekularisme dalam kenyataan bukan lah sebuah realitas tunggal nan jumud. Sekularisme, mengutip Talal Asad (2003, hal. 181), berkaitan dengan cara pandang tertentu tentang dunia dan problema kehidupan sosial dan budaya yang lahir dari cara pandang tersebut.

Buku *Muslim Societies and The Challenge of Secularization an Interdisciplinary Approach* adalah karya Gabriele Marranci (2010), seorang sosiolog dari National University of Singapore (NUS). Buku ini bertujuan untuk meninjau ulang cara pandang penyederhanaan perbandingan budaya antara Islam dan Barat dalam melihat relasi Islam dan sekularisme ataupun relasi Islam dan demokrasi. Buku ini menawarkan paradigma baru dengan menekankan pada persepsi umat Islam itu sendiri yang khas mengenai bagaimana Islam diletakkan dalam konteks masyarakat demokratis ataupun sekuler. Bukan dengan semata-mata mengkopipaste Barat yang meyakini agama harus diisolasi dari kehidupan publik yang sekuler. Buku ini melibatkan sejumlah pakar Sosiologi dan Antropologi yang sepakat untuk mengusung pendekatan di atas. Buku ini dibagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama berjudul "Debating Islam, Secularism, Democracy and Muslim Polity," dan yang kedua bertajuk "Secularization and Dynamics of Muslim Lives in Glocalised Contexts." Tulisan ini mengulas bagian pertama dari buku ini.

### **Islam dan Sekularisme: Deprivatisasi Agama dan Kesalehan Pribadi**

Pandangan teoritis sekularisme sebagai kemerosotan agama di ruang publik dan kemenangan rasionalisme yang dominan di tahun 1960-an, seperti dalam karya Bryan Wilson (1966 dan 1976), telah kehilangan relevansinya. Terbukti agama-agama justru menunjukkan kebangkitan seiring dengan globalisasi. Gejala kebangkitan agama ini memicu peninjauan ulang terhadap konsep sekularisme yang monolitik tersebut. Casanova (1994) mengajukan teori baru tentang sekularisme sebagai realitas sosiologis yang tampil dalam bentuknya yang berbeda-beda. Selain mengamini bahwa sekularisme pada tingkat tertentu menunjukkan gejala merosotnya tradisi dan praktik agama, Casanova menegaskan sekularisme juga menandakan kenyataan sosial-politik di mana agama berbagi ruang publik dengan negara dan pasar.

Dalam aras ini, dia mengemukakan adanya deprivatisasi agama dalam kehidupan modern di mana agama yang awalnya dipandang sebagai realitas private kini menjelma menjadi entitas publik, atau agama publik.

Dalam pendahuluan bagian kedua buku ini, *Islam, Public Religions and the Secularization Debate*, Bryan S. Turner, sosiolog Amerika, *Director Centre for the Study of Contemporary Muslim Societies*, berpendapat bahwa untuk memahami hakikat sekularisasi dalam masyarakat global, harus bisa dibedakan antara sekularisasi politik dan sekularisasi sosial. Sekularisasi politik, mengacu kepada teori Casanova di atas, merupakan pemisahan antara domain politik dan agama dimana warga negara bebas mengungkapkan nilai keagamaan di ruang publik sepanjang tidak mengakibatkan dampak negatif bagi kehidupan publik yang damai dan toleran. Di sisi lain, sekularisasi sosial adalah bagian dari praktik keagamaan dalam arena sosial sehari-hari. Meminjam Pierre Bourdieu (Bourdieu, 1977, 1990), sekularisasi sosial adalah habitus sosial dari praktik keagamaan. Komodifikasi agama dalam kehidupan sosial merupakan contoh gejala sekularisasi sosial. Kebangkitan agama, khususnya dalam konteks Amerika Serikat, yang sebelumnya berada di ruang privat ke ruang publik dimungkinkan oleh kemunculan media TV yang mana digunakan oleh para pendakwah Protestan untuk menyuarakan pandangan keagamaannya terhadap isu-isu publik, seperti homoseksualitas, aborsi, peran perempuan, dsb.

Menurut Turner, karakter agama publik ini bervariasi dari negara ke negara tergantung pada seberapa dominan sebuah agama dalam negara itu atau apakah agama-agama berkontestasi di ruang publik. Hal inilah realitas yang akan menentukan pola dari peran agama di ruang publik. Dalam masyarakat yang plural secara agama dan ras, maka pengelolaan hubungan antar umat beragama adalah kebijakan utama sekurisasi politik (hal. 14). Semata-mata karena agama dapat berperan menjadi kendaraan bagi identitas politik, maka negara harus mengelola hubungan antara agama kalau tidak mau menerima konsekuensi ongkos politik yang mahal karena gagal mengelolanya.

Dalam memahami konsep sekularisasi di negara-negara Muslim, Turner mengajukan teori untuk melihat interaksi antara kesalahan pribadi dengan deprivatisasi agama di ruang publik. Menggunakan teori habitus dan arenanya Bourdieu, Turner memandang penggunaan hijab, makanan halal, penolakan alkohol, dan ide tentang pacaran yang Islami, di negara-negara Muslim, merupakan cara individu meletakkan posisinya dalam hirarki sosial. Namun di sisi lain, kesalahan pribadi juga merupakan strategi menegaskan identitas kolektif yang membedakannya dengan kelompok lain.

Dalam studinya di Indonesia, Malaysia dan Bangladesh, Turner menemukan bahwa tumbuhnya kesalahan pribadi di kalangan perempuan Muslim di tiga negara tersebut merupakan penyikapan mereka terhadap

budaya konsumerisme Barat, sekularisme, dan perubahan radikal akibat globalisasi, seperti urbanisasi yang berlari kencang. Dengan semakin kompleksnya hubungan agama, etnisitas dan budaya di masyarakat perkotaan Muslim, muncul banyak masalah terkait perilaku yang pantas bagi Muslim di hadapan penganut agama yang berbeda. Banyak para perempuan Muslim dari kalangan atas mengikuti pengajian sebagai satu cara untuk menegaskan identitas kolektifnya, sekaligus membangun statusnya dalam struktur komunitas Muslim itu sendiri.

### **Sekularisme dalam Perspektif Pemikir Muslim**

Tema ini diangkat oleh Barbara De Poli dan Göran Larsson. De Poli, sejarawan dan sosiolog Italia, dalam Bab 3, *Muslim Thinkers and the Debate on Secularism and Laïcité*, memaparkan perdebatan mengenai sekularisme di kalangan para sarjana Muslim di Eropa. Bab ini bertujuan menunjukkan peta atau arah budaya yang muncul dari perdebatan tersebut sehingga dapat dikuak adanya pengaruh ideologis dalam melihat hubungan kaum Muslim dengan kelembagaan publik dalam masyarakat Eropa yang sekuler.

Sementara Göran Larsson, pakar studi agama dari Swedia, dalam Bab 4, *Yusuf al-Qaradawi and Tariq Ramadan on Secularisation: Differences and Similarities*, menampilkan perdebatan di kalangan ulama Muslim asli Arab. Keduanya ulama dan pemikir yang berasal dari kalangan Sunni yang juga berpengaruh di minoritas Muslim di Barat, yaitu Yusuf al-Qaradawi and Tariq Ramadan. Menurut Larsson dengan menunjukkan perdebatan tersebut seyogyanya para audiens Barat tidak lagi menganggap orang Islam semuanya menerima sekularisasi atau menolak sekularisasi. Sebaliknya, terdapat kerumitan dan keragaman dalam melihat sekularisasi dalam perspektif Muslim itu sendiri. Dia juga menambahkan perlunya mempertimbangkan studi mengenai apa yang biasa disebut Muslim sekuler atau Muslim kultural, sebagai alternatif terhadap Islam politik. Perspektif studi ini kurang mendapatkan perhatian yang berarti dalam penelitian tentang Muslim baik di Barat maupun dunia Islam.

### **Liberalisme, Modernitas dan Demokrasi dalam Masyarakat Muslim**

Tema penting lain yang disajikan dalam buku ini adalah mengenai isu kebebasan dan demokrasi dalam masyarakat Muslim. Haifaa Jawad, seorang pakar Studi Islam dan Timur Tengah di Birmingham, Inggris, dalam artikel "*Islam and Democracy in the Twenty-First Century*", pada Bab 5, membahas mengenai perspektif teologis Islam dalam menyikapi politik demokratis. Menurutnya tidak banyak yang dapat diketahui dari Al-Qur'an maupun Subhah mengenai ide-ide kelembagaan politik dari perspektif Islam. Menurutnya, Sumber pokok ajaran Islam memang memberikan semacam petunjuk, namun tidak memberikan cetak biru sistem politik dalam Islam yang tegas. Keumuman perspektif Qurani dan Sunnah

mengenai sistem politik ini mengakibatkan munculnya perdebatan kontemporer dalam kalangan Islam yang cukup rumit. Dari perdebatan itu muncul sebagian kaum Muslim yang mendukung sekularisasi sebagai keniscayaan dari kemajuan peradaban manusia, dan sebagainya lagi menolak sama sekali perkembangan ide tentang sekularisasi apapun itu, apakah sosial ataupun politik.

Arif Jamal, saat publikasi buku ini tengah mengambil studi S3 di *the School of Oriental & African Studies, University of London (SOAS)* dengan fokus Hukum Islam, pada Bab 6, *Moving Out of Kazanistan: Liberal Theory and Muslim Contexts*, menentang ide bahwa teori-teori liberal bertolak belakang dengan Islam atau agama Islam. Jamal berpendapat bahwa pertentangan yang dikonstruksi antara Islam dan teori-teori liberal tidak mendasar, alias hanya di permukaan, karena kedua konstruksi tersebut mengabaikan sama sekali perkembangan yang berlangsung dan sangat cair mengenai isu itu.

Namun demikian, Masood Ashraf Raja, dalam artikelnya *Muslim Modernity: Poetics, Politics, and Metaphysics*, yang dimuat di bab 7, mengacu kepada teori Post-colonial Chakrabarty (2004) menunjukkan bahwa sekulerisme model Barat yang dipaksakan di dunia Islam mendapatkan penentangan yang kuat. Pasaunya, pemaksaan tersebut tidak membuka ruang untuk pengkajian yang memadai yang diperlukan agar model sekularisasi tersebut dapat disesuaikan dalam masyarakat Muslim. Dari perspektif tersebut dapat diinysafi bahwa mustahil menangkap makna modernitas di dunia Islam hanya dengan mengandalkan imajinasi Barat dalam melihat sejarah, di mana akhir dari sejarah manusia adalah dicapainya demokrasi liberal, ekonomi pasar bebas, dan negara bangsa yang majemuk. Sebaliknya untuk memahami sejarah masyarakat Islam dan modernitas, struktur gerakan sejarah yang bersifat sementara harus dianalisis dengan memasukkan di dalamnya jalur lintasan kesejarahan yang berbilang.

Sejarawan dari Kennesaw State University, Hakki Gurkas, dalam artikelnya, *Turkish Secular Muslim Identity on Display in Europe*, **dimuat di** Bab 8 buku ini, menunjukkan agamama Muslim di Eropa menempuh jalur lintasan sejarahnya sendiri. Muslim minoritas di Eropa adalah contoh yang tepat untuk menggambarkan bagaimana pengembangan identitas Muslim yang hidup dalam masyarakat demokrasi yang sekuler. Komunitas Turki di Eropa, misalnya, bagaimana mereka didera oleh Islamopobia yang terus meningkat, di mana ide Islam tidak sesuai dengan demokrasi Barat, memainkan peran dalam gejala Islamopobia. Gurkas menampilkan bagaimana cerita rakyat dalam sosok Naruddin Hoja, yang juga dikenal luas di Eropa karena kelucuannya, membantu Muslim Turki di Eropa untuk mengungkapkan kembali identitas netitas keagamaan dan etnis mereka dalam lingkungan masyarakat sekuler Eropa, tanpa menanggalkan identitas keagamaan mereka.

## Identitas Muslim Sekuler

Richard Martin, GB Studi Islam dan Sejarah Agama-Agama di Universitas Emory, Atalanta, AS, dan Kepala American Research Center di Mesir, memberikan kontribusi terakhir dalam bagian kedua buku ini. Dia menulis artikel dengan judul, *Bodies in Islam: Secular Muslim Identities in Modern (and Premodern) Societies*, yang dimuat di Bab 9. Dalam tulisannya ini, Martin menunjukkan bagaimana kurang seriusnya akademisi Barat dalam memahami struktur sosial masyarakat Muslim. Dia menagami bahwa kritik terhadap sekularisme bukan hal yang asing baik di kalangan pemikir Muslim maupun pemikir Barat. Namun, dalam pengamatan sehari-hari yang dialami Martin, masyarakat Muslim pada dasarnya bersifat sekuler juga, bukan masyarakat yang fundamentalis seperti yang diklaim secara sederhana oleh masyarakat Barat. Menurutnya, penentu identitas Muslim itu bukan politik, melainkan ibadah dan Aqidah. Karena itu penting sekali meninjau ulang bagaimana relasi antara Islam dan sekularisme dengan memahami bagaimana keyakinan dan komitmen teologis berhubungan dengan identitas Muslim.

Martine mengajukan pembacaan yang serius tulisan-tulisan Antropologi Muslim, seperti Talal Asad untuk dapat menjawab pertanyaan di atas. Menurutnya, Asad, telah mengkritik narasi sekularisme pasca Pencerahan Eropa sebagai cara baku untuk memahami masyarakat Muslim modern. Karya Talal Asad "Islam, Christianity, and secularism" perlu diperhatikan dengan seksama dalam hal kritiknya terhadap tulisan Charles Taylor tentang pendekatan sekuler dalam memahami agama dan sekularisme yang didasarkan pada filsafat John Stuart Mill dan John Rawls. Taylor memiliki pandangan yang sama dengan Abdullahi an-Na'im, pakar HAM dari Universitas Emory, yang mendukung kritik Talal Asad terhadap pendekatan Taylor yang bersifat Erosentris.

## Daftar Pustaka

- Asad, T. (2003). *Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity*. Stanford University Press.
- Bourdieu, P. (1990). *The Logic of Practice*. Polity Press.
- Casanova, J. (1994). *Public Religions in the Modern World*. University of Chicago Press.
- Marranci, G. (2009). *Understanding Muslim Identity: Rethinking Fundamentalism*. Palgrave.
- Rapport, N. (1997). *Transcendent Individual: Towards a Literary and Liberal Anthropology*. Routledge.
- Roy, O. (2007). *Secularism Confronts Islam*. Columbia University Press.

Wilson, B. (1966). *Religion in Secular Society*. Watts.

Wilson, B. (1976). *Contemporary Transformations of Religion*. Oxford University Press.